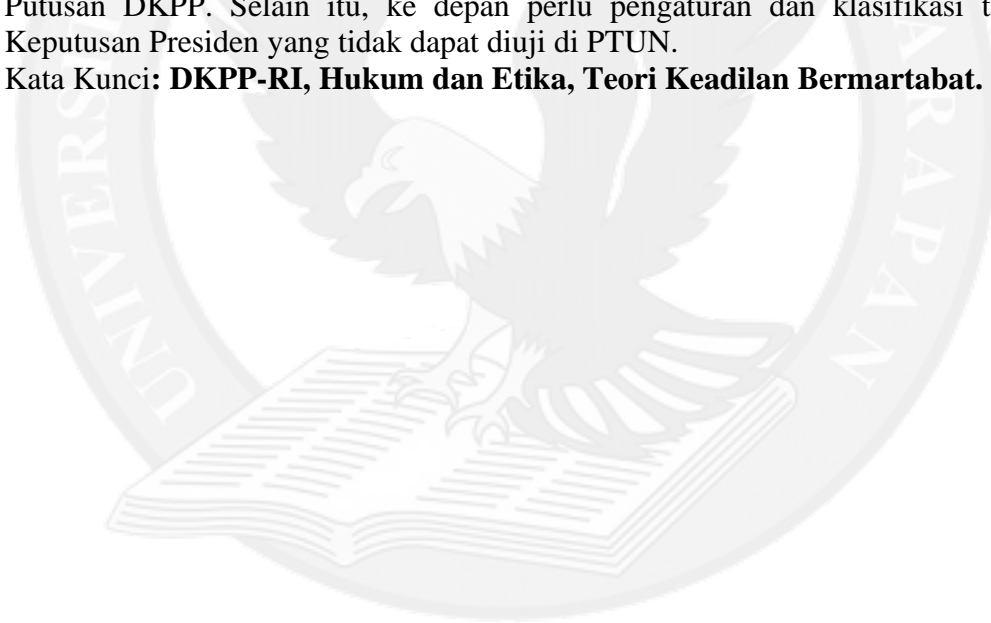


ABSTRAK

Hukum dan etika merupakan pedoman perilaku serta sebagai bagian dari subsistem sosial-kemasyarakatan. Dalam hal ini, hukum dan etika perlu berkolaborasi dalam mengatur perilaku masyarakat. Permasalahan antara hukum dan etika terjadi tatkala putusan hukum justru bersinggungan dengan putusan peradilan etik. Penelitian ini mengedepankan pokok permasalahan yaitu pertentangan Putusan DKPP-RI dengan Putusan PTUN. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dengan mengedepankan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa kekuatan hukum putusan DKPP-RI dalam menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bersifat final dan mengikat dan sejajar dengan putusan pengadilan (PTUN). Bahwa, Putusan PTUN yang membatalkan Keputusan Presiden RI No. 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Penyelenggara Pemilu sebagai tindak lanjut Putusan DKPP-RI dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat tidak dapat mengubah keadaan hukum yang telah terikat melalui Putusan DKPP. Selain itu, ke depan perlu pengaturan dan klasifikasi terkait Keputusan Presiden yang tidak dapat diuji di PTUN.

Kata Kunci: DKPP-RI, Hukum dan Etika, Teori Keadilan Bermartabat.



ABSTRACT

Law and ethics are behavioral guidelines as well as part of the social-community subsystem. In this case, law and ethics need to collaborate in regulating people's behavior. Problems between law and ethics occur when legal decisions actually intersect with ethical court decisions. This study puts forward the main problem, namely the conflict between the DKPP-RI Decision and the Administrative Court Decision. This thesis research uses a legal research method, by prioritizing a statutory approach, a concept approach, and a case approach. The conclusion of this study is that the legal force of the DKPP-RI's decision in resolving cases of violations of the electoral code of ethics is final and binding and parallel to court decisions (PTUN). Whereas, the Administrative Court Decision which annuls the Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 34/P of 2020 concerning Disrespectful Dismissal of Election Organizers as a follow-up to the DKPP-RI Decision in the perspective of the theory of Dignified Justice cannot change the legal situation that has been bound by the DKPP Decision. In addition, in the future it is necessary to regulate and classify related to Presidential Decrees that cannot be tested in the Administrative Court.

Keywords: *DKPP-RI, Law and Ethics, The Dignified Justice Legal Science.*